

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor riil yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dalam Kusdiana dan Gunardi (2014) disebutkan bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, baik dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja maupun dalam pertumbuhan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB). Seperti yang dikemukakan oleh Rostiana dan Djulius (2018), beberapa dampak dari pengembangan UKM adalah (a) penciptaan lapangan kerja, (b) penciptaan peluang dalam meningkatkan pendapatan keluarga, (c) meningkatkan kepemilikan aset keluarga, (d) meningkatkan keterampilan bisnis, (e) meningkatkan akses pada institusi keuangan, (f) menyediakan barang dan jasa yang terjangkau bagi orang miskin.

UMKM menjadi satu-satunya sektor usaha yang sanggup bertahan sebelum dan sesudah Krisis Moneter tahun 1998. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah UMKM bahkan mulai meningkat pasca tahun 1998 (Tabel 1.1). Jumlah UMKM pada tahun 1997 sebanyak 39.765.110 unit usaha, pada tahun 1998 sebesar 36.813.578 unit usaha, walaupun jumlah UMKM menurun pada tahun 1998 tetapi kembali meningkat pada tahun 1999 menjadi 37.911.723 unit.

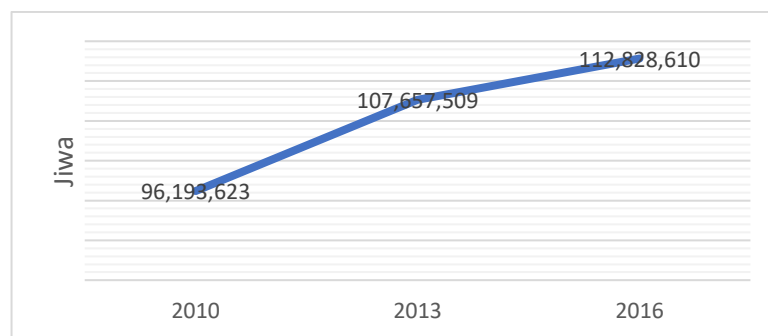
Sedangkan untuk jumlah unit usaha besar sebanyak 2.097 unit usaha pada tahun 1997, dan pada tahun 1998 sebanyak 1.831 unit dengan kecenderungan menurun serta meningkat pada tahun 1999 sebanyak 1.885 unit, meskipun tidak signifikan UMKM.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 1997-1999 (Unit)

| Indikator | Satuan | 1997 | 1998 | 1999 |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Jumlah UMKM | Unit | 39.765.110 | 36.813.578 | 37.911.723 |
| Jumlah Usaha Besar | Unit | 2.097 | 1.831 | 1.885 |

Source : Badan Pusat Statistik (BPS)

Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga mengalami peningkatan secara kontinu, terlihat pada gambar 1.1 penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan setiap periodenya yaitu tahun 2010, 2013 dan 2016. Pada tahun 2010 sebesar 96.193.623 jiwa, meningkat pada tahun 2013 sebesar 107.657.509 jiwa dan 112.828.610 jiwa pada tahun 2016.



Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Pada UMKM (Jiwa)

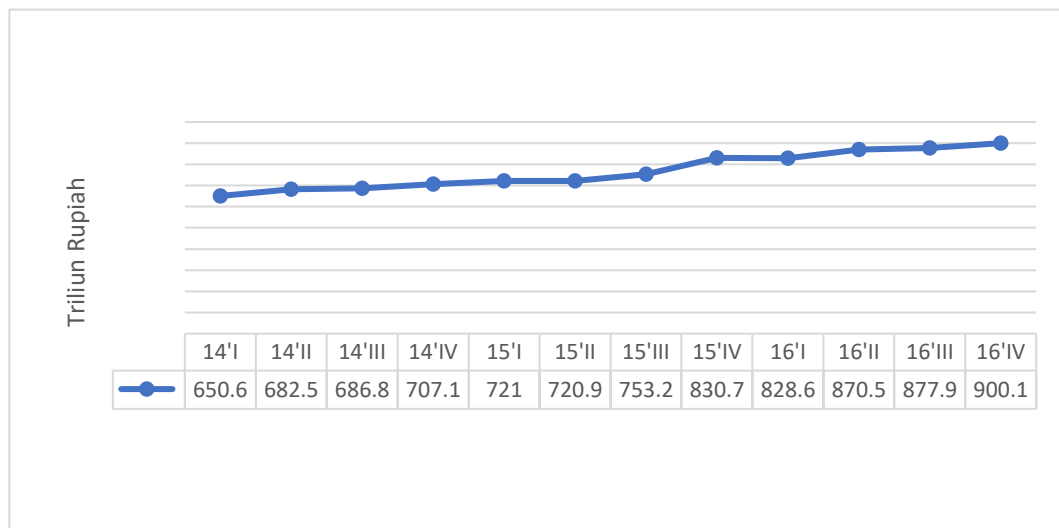
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2015-2019 juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, UMKM berjumlah 59.262.772 unit dan 4.987 unit untuk Usaha Besar (UB). Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah UMKM telah mencapai 65.465.497 unit dan 5.637 unit UB pada tahun 2019. Hingga tahun 2017, pangsa pasar UMKM mencapai 99,99% sedangkan UB sebanyak 0,01% (UMKM Indonesia, 2018).

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2015-2019 (Unit)

| Indikator | Satuan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah UMKM | Unit | 59.262.772 | 61.651.177 | 62.922.617 | 64.194.057 | 65.465.497 |
| Jumlah UB | Unit | 4.987 | 5.370 | 5.460 | 5.550 | 5.637 |

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah permodalan. Berdasarkan publikasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2013) disebutkan bahwa struktur modal UMKM di Indonesia hampir sebagian besar berasal dari dana pribadi. Apabila para pelaku usaha ini membutuhkan suntikan dana dari luar, mereka cenderung memilih Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau rentenir.

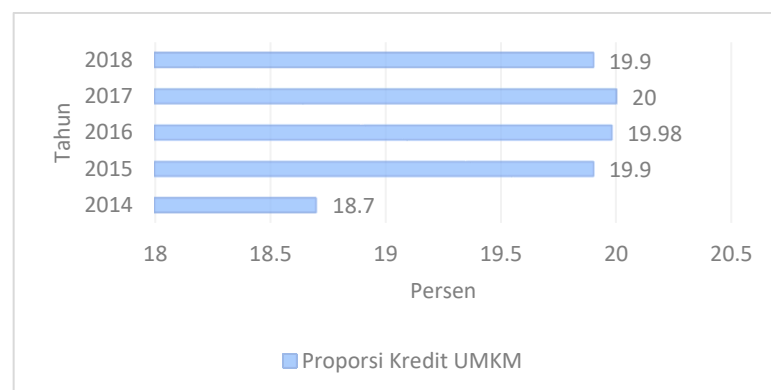
Berdasarkan publikasi Bank Indonesia (BI) terkait perkembangan kredit untuk UMKM diketahui cenderung naik setiap periodenya. Data perkembangan kredit untuk UMKM dapat dilihat pada gambar 1.2. Walaupun penyaluran kredit untuk UMKM mengalami peningkatan, tetapi ditinjau dari proporsi kredit untuk UMKM terhadap total kredit perbankan pada tahun 2015-2019 rata-rata masih berada di bawah 20% (gambar 1.3).



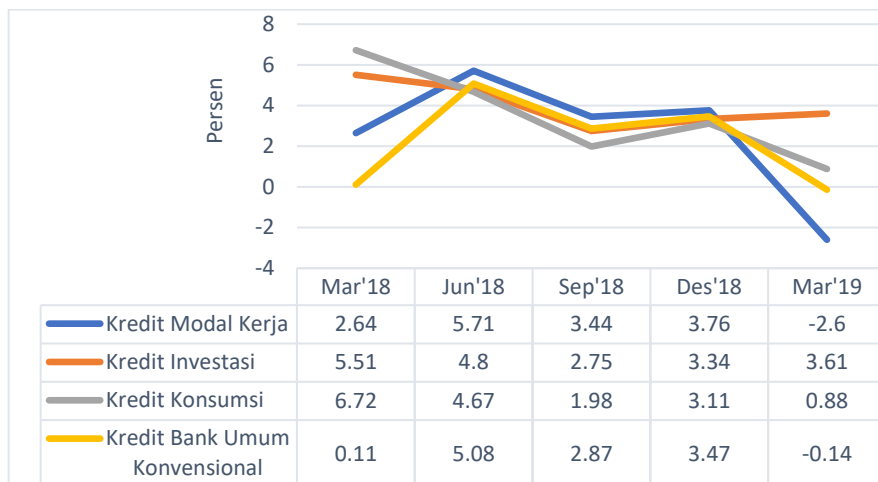
Gambar 1.2
Perkembangan Kredit Untuk UMKM 2014.I-2016.IV (Triliun Rupiah)

Menurut Bernardin dan Sofyan (2019) penyaluran kredit secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, baik melalui perluasan produksi dan kegiatan usaha lainnya maupun dalam mendorong munculnya unit-unit usaha baru. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rostiana dan Djulius (2018), perkembangan

UMKM yang diukur dari jumlah unit usaha, jumlah penyerapan tenaga kerja, nilai *output* usaha dan nilai investasi berpengaruh memiliki dampak yang lebih signifikan yaitu memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Maka UMKM merupakan salah satu sektor digdaya dalam perekonomian. Pada Maret 2019, kredit yang diberikan Bank Umum Konvensional (BUK) berkontraksi -0,14% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,47% (qtq). Hal tersebut didorong oleh Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK) yang berkontraksi (gambar 1.4).



Gambar 1.3
Proporsi Kredit Untuk UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan (Persen)



Gambar 1.4
Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (%)

Perbankan merupakan lembaga intermediasi (perantara) dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 Tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka perbankan melaksanakan pemberian kredit bagi pelaku UMKM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Retnadi, perbankan dalam menyalurkan jumlah kreditnya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan bank dalam menghimpun dana dan tingkat suku bunga. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, peraturan pemerintah dan lain-lain (Hasanah dan Busneti, 2016). Dalam Pratiwi dan Sudirman (2014), penyaluran kredit dipengaruhi juga oleh *Non Performing Loan* (NPL) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Fenomena tingginya suku bunga di Indonesia terkait dengan kinerja sektor perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (perantara), kebiasaan masyarakat untuk bergaul dan memanfaatkan berbagai jasa bank secara relatif masih rendah, dan sulit untuk menurunkan suku bunga perbankan bila laju inflasi selalu tinggi (Prasetiantono, 2000:99-101) dalam Hasibuan dan Pratomo (2013). Menurut Tjoe, dkk (2020), semakin tinggi suku bunga kredit maka keinginan untuk mengambil kredit semakin kecil karena tingkat pengembalian dana yang semakin besar. Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh suku bunga kredit terhadap keinginan masyarakat dalam mengambil kredit adalah negatif.

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu permasalahan dalam kredit perbankan dari sisi penawaran. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi NPL maka cadangan dana dalam perbankan juga harus lebih besar karena dapat memengaruhi arus modal dalam perbankan. Terdapat hubungan negatif antara *Non Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran kredit; peningkatan NPL akan diikuti dengan penurunan penyaluran kredit, atau penurunan NPL akan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit (Rosalina, dkk:2019).

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam memajukan perekonomian Indonesia melalui kebijakan atau program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program yang diberikan kepada para pelaku UMKM. Intensitas penyaluran kredit untuk UMKM dimulai tahun 2015 berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Oleh Bank Umum, dalam PBI tersebut ditetapkan jumlah kredit atau pembiayaan UMKM dilaksanakan secara bertahap dan paling rendah 20% pada tahun 2018 yang

dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, maka pemerintah melakukan subsidi bunga dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR.

Pada tabel 1.3 terdapat data perkembangan suku bunga KMK dan NPL Indonesia tahun 2015-2019. Diketahui bahwa data suku bunga KMK dan NPL UMKM cenderung menurun setiap tahunnya. Suku bunga KMK yang pada tahun 2015 sebesar 12,48% mengalami penurunan hingga sebesar 10,09% pada tahun 2019. NPL pada tahun 2015 sebesar 4,20% mengalami penurunan hingga 4,15% pada tahun 2016, sebesar 4,09% pada tahun 2017 dan 3,44% pada tahun 2018.

Tabel 1.3
Perkembangan Suku Bunga KMK dan NPL Tahun 2015-2018

| Tahun | Suku Bunga KMK (%) | NPL (%) |
|--------------|---------------------------|----------------|
| 2015 | 12,48 | 4,20 |
| 2016 | 11,38 | 4,15 |
| 2017 | 10,71 | 4,09 |
| 2018 | 10,37 | 3,44 |

Sumber : SSKI - BI

Beberapa penelitian dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran kredit untuk UMKM, baik dengan variabel ekonomi maupun sosio-ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh Hasanah dan Priantina (2017) dengan hasil bahwa tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit untuk UMKM sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit untuk UMKM.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arum Akbar Sagita, Lucia Rita Indrawati dan Gentur Jalunggono (2019) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap KMK (Kredit Modal Kerja), tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap KMK, *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil lain menunjukkan bahwa inflasi, tingkat suku bunga serta NPL berpengaruh secara simultan terhadap KMK.

Mohammed Ziaul Hoque, Nilufar Sultana dan Tasmia Thalil melakukan penelitian dengan berfokus pada variabel-variabel sosio-ekonomi. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 dengan studi kasus di Kota Chittagong, Bangladesh. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendidikan, umur perusahaan, status perkawinan, investasi awal dan jumlah karyawan tidak berdampak pada penyaluran kredit. Sebaliknya, usia dan jenis kelamin pemilik usaha, status keluarga, status tempat tinggal dan tempat kerja serta tanggungan dalam keluarga berdampak pada penyaluran kredit.

Melihat keterkaitan antara suku bunga, NPL serta kebijakan pemerintah dalam menunjang penyaluran kredit untuk UMKM, maka penulis tertarik untuk mengambil topik “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYALURAN KREDIT UNTUK UMKM DI INDONESIA DALAM JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG (PERIODE TRIWULAN I 2010-TRIWULAN IV 2019)**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh suku bunga KMK dan NPL terhadap penyaluran kredit untuk UMKM di Indonesia dalam jangka pendek periode triwulan tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh suku bunga KMK, NPL dan kebijakan pembiayaan subsidi bunga KUR 2015 terhadap penyaluran kredit untuk UMKM di Indonesia dalam jangka panjang periode triwulan tahun 2010-2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini ialah :

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga KMK dan NPL terhadap penyaluran kredit untuk UMKM di Indonesia dalam jangka pendek periode triwulan tahun 2010-2019.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga KMK, NPL dan kebijakan pembiayaan subsidi bunga KUR 2015 terhadap penyaluran kredit untuk UMKM di Indonesia dalam jangka panjang periode triwulan tahun 2010-2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan kajian dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ekonomi, dengan melihat pengaruh dari suku bunga kredit, NPL dan pembiayaan subsidi bunga KUR 2015 terhadap penyaluran kredit untuk UMKM di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Sebagai referensi bagi pemerintah maupun bank sentral dalam menilai dan melihat kinerja lembaga perbankan serta minat masyarakat terhadap penyaluran kredit untuk UMKM di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Sebagai bahan literatur bagi masyarakat atau mahasiswa/i khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pasundan.